Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak *Online*

Aji Rifqi Rawadani dan Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

fidiana@stiesia.ac.id

Abstract: This research aims to examine the difference of Original Regional Revenue Surabaya before and after the *Online* Tax System in the 2015-2017 period. The population in this research are hotel tax, restaurant tax, and parking tax in Surabaya city area in every month at 2015-2017 period which amount to 36 data. The data in this research are secondary data covering the realization and target of hotel tax, restaurant tax, and parking tax during the 2015-2017 period obtained from Surabaya City Financial and Regional Tax Management Board. Hypothesis test using independent t independent test analysis, using SPSS. The results showed that there are differences in the original income of Surabaya city before and after the *online* tax system in 2015-2017. The achievement of effectiveness level before and after the *online* system is increase in hotel tax and parking tax, whereas in restaurant tax the achievement of its effectiveness is stable from 2015-2017. So with the *online* tax system will provide convenience and provide oversight of taxpayers in reporting the amount of tax, so the potential for tax leakage can be minimized which will automatically give influence in increasing the original income of the city of Surabaya

Keywords: *online* tax system, effectivity before and after, local original income

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak *Online* pada periode 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di daerah kota Surabaya tiap bulan selama periode 2015-2017 yang berjumlah 36 data. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi realisasi dan target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir selama runtun waktu 2015-2017 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Uji hipotesis menggunakan analisis uji beda t independent, menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan asli daerah kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online* pada tahun 2015-2017. Pencapaian tingkat efektivitas sebelum dan sesudah sistem *online* terjadi peningkatan pada pajak hotel dan pajak parkir, sedangkan pada pajak restoran pencapaian efektivitasnya stabil dari tahun 2015-2017. Jadi dengan adanya sistem pajak *online* akan memberikan kemudahan dan memberikan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaporkan besaran pajaknya, sehingga potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir yang otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya

Keywords: Sistem Pajak *Online*, Efektivitas Sebelum dan Sesudah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan untuk pembangunan memerlukan pendapatan yang dapat diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan secara penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya (Putri *et al.*, 2014). Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerahnya. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang terdapat dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD (Gurel *et al.*, 2016; Mahangila and Anderson, 2017).

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir merupakan tiga jenis pajak daerah (Ardhiansyah *et al.*, 2014; Putri *et al.*, 2014) yang potensinya semakin hari semakin berkembang sejalan dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yakni sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Sebagai salah satu kota terbesar di daerah Jawa Timur, kota Surabaya terus melakukan pembangunan gedung-gedung bertingkat yang meliputi hotel, apartemen dan sejenisnya yang potensi pendapatannya sangat besar dan nantinya dapat menjadi salah satu penyumbang untuk meningkatkan pendapatan daerah (Jannah *et al.*, 2016) Surabaya. Demikian juga dengan pajak restoran dan pajak parkir merupakan hal yang sangat mungkin juga untuk menjadi potensi dalam meningkatkan pendapatan kota Surabaya, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya restoran dan café yang didirikan di Surabaya dan diimbangi dengan daya beli masyarakat Surabaya khususnya kalangan remaja yang gemar berkumpul di cafe maupun restoran. Dengan diberlakukannya parkir meter di daerah Jimerto, Sedap Malam, Taman Bungkul dan terdapat parkir zona yang tersedia di beberapa tempat di Surabaya dan didukung dengan adanya penerapan sistem *online* Surabaya diharapkan juga dari pajak parkir dapat meningkatkan pendapatan kota Surabaya.

Sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem *online* terhadap pajak daerah di kota Surabaya yaitu meliputi pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir merupakan 3 jenis pajak yang telah diatur dalam penerapan sistem *online* yang potensi pendapatannya sangat rawan terjadinya kecurangan dalam menyampaikan atau menyetorkan besaran pajaknya. Hal ini disebabkan karena sistem perhitungan pajaknya menggunakan *Self Assesment* sehingga wajib pajak menghitung besaran pajaknya sendiri dan petugas pajaknya hanya sebagai pengawas.

BPKPD akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya untuk pengadaan jaringan untuk mendukung berjalannya sistem *online*. Pajak daerah ini. BPKPD menargetkan setidaknya 50% dari wajib pajak ini

tercakup dalam survei ini. Sehingga bisa diketahui bagaimana kesiapan wajib pajak dalam menerapkan sistem tersebut. Tahun 2017 ini BPKPD masih dalam tahap uji coba sistem *online* ini. Sedangkan penerapan sistem *online* untuk Pajak Daerah ini sesuai Perda, baru efektif berlaku tahun depan yaitu 2018 (Perdana, 2017). Namun tidak ada sebuah sistem yang sempurna, begitu pula dengan sistem *Online* Pajak Daerah ini yang pastinya juga memiliki keterbatasan maupun kendala. Sistem ini terkendala dengan sistem IT setiap hotel maupun restoran yang berbeda-beda, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama agar sistem pajak *online* dapat diterapkan pada hotel dan restoran di Surabaya secara merata. Demikian juga dengan penerapan untuk sistem pajak *online* terhadap transaksi parkir, hal itu disebabkan karena di Surabaya belum semua tempat menggunakan parkir meter.

Jadi, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Surabaya pemerintah kota Surabaya menerapkan sistem *online* untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dan berfungsi juga untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pajak. Untuk itu, penelitian ini ingin membuktikan efektivitas penerapan pajak *online* pada Pemerintah Kota Surabaya pada skema pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

Sistem *online* diterapkan merujuk pada peraturan kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem *online* terhadap pajak daerah di kota Surabaya. Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 ayat 1 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemasangan tanda peringatan, legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha, dan pelaporan seluruh transaksi usaha harian.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005). Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sementara itu, pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk memungut pajak daerah sehingga kita mengenal ada pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Undang-Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009 membagi pajak provinsi bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang di pungut oleh pemerintah.

Pajak kabupaten/kota terdiri bersumber dari pajak hotel (Ida, 2013; Lamia, 2015), pajak restoran (Yuliandari, *et al.*, 2017; Pertiwi dan Purwanti, 2014), pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir,

pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimilie, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau di kelola oleh hotel. Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah hotel, motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar, dan rumah penginapan.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Menurut peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Wajib pajak hotel wajib mencantumkan pajak hotel sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel. Dalam hal wajib pajak hotel tidak mencantumkan pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender. Saat terutangnya pajak hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan SPTPD.

Seiring dengan berkembangnya tingkat pembangunan di Surabaya khususnya pembangunan hotel dan sejenisnya yang merupakan subjek dari pendapatan asli daerah Surabaya yang berguna untuk membiayai kebutuhan daerah Surabaya (Yuliandari *et al.*, 2017). Meski pendapatan dari daerah Surabaya di sektor pajak hotel terus meningkat dari setiap tahunnya tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pajak hotel (Ida, 2013) masih terjadi dan sehingga pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah Kota Surabaya di sektor pajak hotel tidak sesuai semestinya. Fenomena ini dibuktikan oleh Candrasari (2016). Oleh karena itu, dengan aplikasi *online* diharapkan dapat menekan kebocoran pajak hotel. Maka, hipotesis yang diusulkan adalah terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak hotel.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran (Siahaan, 2005). Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, jasa boga/*catering* dan kegiatan usaha lainnya yang

sejenis. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini mengacu pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Menurut peraturan daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera, toko roti/bakery, jasa boga/catering. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Wajib pajak restoran wajib mencantumkan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran. Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran. Masa pajak restoran jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender. Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat di sampaikan SPTPD.

Banyaknya restoran, tempat makan dan sejenisnya yang terus berkembang pesat di daerah Kota Surabaya, menjadikan pajak restoran sebagai pendapatan daerah yang dapat di andalkan untuk di Surabaya. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan sistem pembayaran pajak *online* untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak dari pajak restoran (Candrasari, 2016). Sistem pajak *online* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari usaha restoran dan sebagai sarana pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak. Maka, hipotesis yang diusulkan adalah terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak restoran.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Siahaan, 2005). Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang

diberikan kepada penerimaan jasa parkir. Pembayaran parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, vallet, dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di hitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang parkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam satu bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap. Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur adalah bahwa kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu ratus rupiah). Kendaraan truck, bus, dan alat besar/ berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kendaraan sepeda, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah).

Tarif pajak parkir untuk penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran. Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran. Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran. Penyelenggaraan tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 39.

Peraturan daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah menetapkan masa pajak parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan satu bulan kalender. Bagi penyelenggara tempat parkir tetap progresif, vallet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan. Saat terutangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.

Parkir merupakan salah satu pendapatan Kota Surabaya yang dapat di andalkan sebagai memenuhi kebutuhan Kota Surabaya. Dengan adanya penerapan sistem *online* pajak parkir di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Surabaya. Pemerintah Surabaya berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak parkir dengan cara penerapan parkir meter di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam berhasil mengikis kebocoran parkir yang selama ini terjadi. Pendapatan parkir di lokasi tersebut meningkat seratus persen dibandingkan sebelum (Effendi, 2017). Seiring dengan perkembangan kendaraan di Kota Surabaya yang semakin banyak dan tersedianya zona parkir dan di

dukung dengan sistem yang baik di harapkan pendapatan di pajak parkir dapat meningkat. Damayanti (2017) membuktikan efektivitas pajak parker pada tahun 2015. Dengan sistem *online* diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan pajak parkir. Hipotesis diusulkan adalah terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak parkir.

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem *online* pajak daerah di Kota Surabaya untuk merekam semua aktivitas transaksi. Data transaksi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak. Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku. Perekaman data transaksi usaha untuk penyelenggaraan parkir yaitu pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/smartcard atau sejenisnya, penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan valet, penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma, pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain sticker/tiket/smartcard atau sejenisnya.

Perekaman data transaksi usaha untuk penyelenggaraan pelayanan hotel yaitu pembayaran sewa kamar, pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel, pembayaran jasa penunjang, untuk; laundry, telepon, faksimile, internet, teleks, fotokopi, transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain, service charge, dan/atau sejenisnya, pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan oleh hotel, dan banquet, berupa persewaan ruang rapat atau ruang pertemuan.

Perekaman data transaksi usaha untuk penyelenggaraan pelayanan restoran, meliputi pembayaran makan dan minuman, pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*), pembayaran service charge, dan pembayaran jasa boga/catering. Berikutnya adalah perekaman data transaksi usaha untuk penyelenggaraan hiburan, meliputi tontonan film, yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya dan/atau pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha Pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya, pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas dan/atau pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha Pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa, dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya dan/atau pembayaran makan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha Diskotik, yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, pembayaran sewa meja, pembayaran makanan dan minuman; dan/atau pembayaran sewa ruangan. Perekaman data transaksi usaha Karaoke, yaitu pembayaran sewa ruangan, pembayaran jasa pemandu lagu, pembayaran makanan dan minuman dan/atau pembayaran service charge.

Perekaman data transaksi usaha Klub malam, pub, bar, musik hidup (live music), disc jockey (DJ) dan sejenisnya, yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya, pembayaran sewa ruangan, pembayaran

sewa meja; dan/atau pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha sirkus, acrobat dan sulap, yaitu: pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya, pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas, dan/atau pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu: pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya, pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual, pembayaran biaya keanggotaan dan/atau pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha panti pijat refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu pembayaran sewa ruangan, pembayaran sewa terapi, pembayaran biaya dimuka pembayaran biaya keanggotaan dan/atau pembayaran makanan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha pertandingan olahraga, yaitu pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya, pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau pembayaran makan dan minuman. Perekaman data transaksi usaha penyelenggaraan hiburan ditempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya yaitu pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

Untuk menegakkan pengumpulan pajak daerah ini, Pemerintah daerah dapat mengenakan sanksi bagi yang melanggar berupa sanksi administrasi antara lain peringatan tertulis, pemasangan tanda peringatan, legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha, pelaporan seluruh transaksi usaha harian. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Walikota.

Sanksi pidana juga dapat diterapkan bagi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tindak pidana pelanggaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait pajak daerah. Rochmah (2010) meneliti perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan internet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Terhadap Penerimaan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti bahwa terdapat signifikansi yang kuat mengenai perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan internet terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder penerimaan pajak yaitu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya internet dan 2 (dua) tahun sesudah diberlakukannya internet pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Dalam penelitian ini data penerimaan pajak kemudian di proses dan di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji statistik. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji beda t-test. Hasil penelitian menunjukkan

terdapat perbedaan yang signifikan setelah di berlakukannya internet berdasarkan SIDJP terhadap penerimaan pajak.

Candrasari (2016) meneliti Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas pajak hotel sangat efektif di tahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas pajak restoran pada tahun 2012 108,21% menunjukkan peningkatan sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi pajak hotel dan restoran serta realisasi PAD terus meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi pajak hotel dan restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Leliya (2016) meneliti Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembayaran pajak online, manfaat sistem pembayaran pajak online bagi wajib pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Cirebon melalui sistem online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, penggunaan bahan dokumen, bahan dokumen tersebut berdasarkan informasi data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Cirebon berupa buku peraturan daerah Kota Cirebon tentang pajak daerah, user manual SPTPD online dan pendapatan pajak daerah tahun 2013-2015, dan yang terakhir metode triangulasi dalam penelitian ini membandingkan peraturan pusat dengan peraturan daerah yang berlaku. Hasil penelitian ini bahwa sistem online memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, penyerdahanaan proses serta mengefisienkan waktu serta pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Samudra (2012) meneliti Analisis Efektivitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta menurut tujuh indikator pengukuran yang digunakan peneliti, yaitu strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staff, skill dan nilai bersama sudah efektif walaupun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Damayanti (2017) meneliti Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang diteliti adalah data realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2011 sampai dengan 2015, dan data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2011 sampai dengan 2015. Teknik analisis data untuk menjawab masalah yang pertama dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif, untuk masalah yang kedua dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sudah efektif. Kemudian, kontribusi pajak parkir pada tahun 2011 sebesar 0,862%; tahun 2012 sebesar 0,615%; tahun 2013 sebesar 0,611%; tahun 2014 sebesar

0,659%; tahun 2015 sebesar 0,791%. Semua kontribusi tersebut menunjukkan angka dibawah 10% yang berarti masuk ke dalam kriteria sangat kurang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang akan mencoba menganalisis pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak kota. Pembahasan akan mengacu pada data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang terdiri dari wajib pajak hotel, restoran, dan parkir. Selanjutnya digunakan beberapa metode analisis data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perbedaan pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah penerapan sistem pajak *online*.

Pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan data-data yang di perlukan dalam penelitian yang di peroleh di instansi terkait. Laporan yang terkait yaitu realisasi dan target pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini data yang di peroleh berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto no 25-27 Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan realisasi dan target pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir pada tahun 2015-2017 yang diambil di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Pengujian data dimulai dari statistik deskriptif. Menurut (Ghozali, 2016), uji ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Uji normalitas menurut (Ghozali, 2013) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Alat analisis data yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah dengan uji kolmogorov smirnov. Dasar pengembalian keputusan menurut (Ghozali, 2016) apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Uji beda t independent menurut (Ghozali, 2016) digunakan untuk menentukan apakah dua sampel tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda t independent dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dalam penelitian ini uji beda t independent digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian penelitian ini pertama uji asumsi kedua varian populasi sama (equal variance assumed) apabila menghasilkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka varian sama sedangkan berbeda (equal variances not assumed) apabila menghasilkan signifikansi $< 0,05$. Kedua, jika uji t menghasilkan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima sehingga hipotesis di tolak dan dapat di simpulkan bahwa tidak ada perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online* sedangkan nilai signifikansi menghasilkan $< 0,05$ maka H_0 di tolak sehingga hipotesis di terima dan dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN/DISKUSI

Uji Normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan di uji mengikuti berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan banyak metode salah satu nya yaitu dengan Kolmogorov Smirnov. Kriteria yang di gunakan apabila nilai sinifikansi $> 0,05$ data berdistribus normal sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 1. Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

		Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir
N		36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	17717636132.91	27976878041.7	5481539756.97
	Std. Deviation	3075673341.567	3844433761.61	855443500.294
	Absolute	.095	.150	.126
Most Extreme Differences	Positive	.095	.150	.076
	Negative	-.076	-.077	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		.570	.902	.755
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902	.391	.619

Dari Tabel di atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir berdistribusi normal, dilihat dari tingkat signifikan yang dihasilkan lebih dari 0,05.

Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari data yang akan diteliti. Rata-rata (mean) digunakan untuk mengetahui rata-rata dari data yang akan diteliti, nilai minimum untuk mengetahui nilai yang paling terkecil dalam data penelitian, nilai maksimum untuk mengetahui nilai yang paling besar dalam data penelitian, dan standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari data rata-rata. Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kota Surabaya pada tahun 2015-2017, disajikan hasil deskripsi sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	11790909936	24178373263	17717636132.91	3075673341.567
Pajak Restoran	36	21828493256	35315705205	27976878041.77	3844433761.616
Pajak Parkir	36	2151034054	6730193169	5481539756.97	855443500.294

Sumber: Hasil uji statistik, 2018

Berdasarkan Tabel di atas hasil statistik deskriptif dapat menggambarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian ini. Tabel di atas menunjukkan dalam penelitian ini ada 36 data observasi yang di gunakan. Kesatu dalam pajak hotel menghasilkan nilai minimum sebesar Rp11.790.909.936 terjadi di bulan Agustus tahun 2015 hasil ini di peroleh karena pada tahun 2015 belum adanya Peraturan Daerah Surabaya tentang sistem

pajak *online* untuk mengatur pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dalam pajak hotel di peroleh nilai maksimum Rp24.178.373.263 terjadi pada bulan Desember tahun 2017, hal ini disebabkan banyaknya perkembangan pembangunan hotel di Kota Surabaya dan sudah di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang sistem pajak *online*. Diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp17.717.636.132,91 sedangkan nilai standar deviasi Rp3.075.673.341,567. Kedua nilai minimum pajak restoran sebesar Rp21.828.493.256 terjadi pada bulan Maret 2015 disebabkan restoran di Kota Surabaya masih belum berkembang pesat seperti saat ini. Diperoleh nilai maksimum pajak restoran sebesar Rp35.315.705.205 yang terjadi pada bulan Agustus 2017 disebabkan karena banyaknya restoran-restoran yang bertumbuh pesat di daerah Kota Surabaya pada saat ini. Nilai rata-rata (mean) sebesar Rp27.976.878.041,77 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp3.844.433.761,616. Ketiga nilai minimum pajak parkir Rp2.151.034.054 yang terjadi pada bulan Januari 2015 di sebabkan karena banyaknya sepeda motor di Surabaya yang belum berkembang pesat dan masih banyaknya parkir liar yang ada di Kota Surabaya. Diperoleh nilai maksimum sebesar Rp6.730.193.169 yang terjadi pada bulan Agustus 2017 disebabkan karena banyaknya parkir-parkir resmi di daerah Kota Surabaya dan di terapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang pajak *online* dan didukung dengan semakin banyaknya kendaraan di Kota Surabaya. Diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar Rp5.481.539.756,97 sedangkan nilai standar deviasi Rp855.443.500,294.

Uji beda dalam penelitian ini menggunakan uji beda t independent yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Berikut disajikan tabel statistik deskriptif dan uji beda.

Tabel 3.Hasil Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah

	PAD	N	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	sebelum	24	16835059498.41	2864305063.593
	sesudah	12	19482789401.92	2801143241.721
Pajak Restoran	sebelum	24	25848915248.86	2476224920.326
	sesudah	12	32232803627.61	2136849205.828
Pajak Parkir	sebelum	24	5097221234.21	761652868.439
	sesudah	12	6250176802.50	385572292.617

Sumber: Hasil uji statistik, 2018

Dari Tabel di atas dapat dibedakan nilai rata-rata (mean) Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online* yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Kesatu nilai rata-rata pajak hotel sebelum sistem *online* sebesar Rp16.835.059.498,41 dengan standar deviasi Rp2.864.305.063,593 dan untuk nilai rata-rata pajak hotel sesudah sistem pajak *online* sebesar Rp19.482.789.401,92 dengan standar deviasi Rp2.801.143.241,721 sehingga terjadi peningkatan nilai rata-rata (mean) pajak hotel sebelum dan sesudah sistem pajak *online*. Kedua nilai rata-rata pajak restoran sebelum sistem pajak *online* sebesar Rp25.848.915.248,86 dengan standar deviasi Rp2.476.224.920,326 dan untuk nilai rata-rata sesudah sistem pajak *online* sebesar Rp32.232.803.627,61 dengan standar deviasi Rp2.136.849.205,828 sehingga terjadi peningkatan nilai rata-rata (mean) pajak restoran sebelum dan sesudah sistem pajak *online*. Ketiga nilai rata-rata pajak parkir sebelum sistem pajak *online* sebesar Rp5.097.221.234,21 dengan standar deviasi Rp761.652.868,439 dan untuk nilai rata-rata pajak parkir sesudah sistem pajak *online* sebesar Rp6.250.176.802,50 dengan standar

deviasi Rp385.572.292,617 sehingga terjadi peningkatan nilai rata-rata (mean) pajak parkir sebelum dan sesudah sistem pajak *online*. Hasil uji beda *t independent* disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Beda *t Independent*

		F	Sig.	T	Sig.
Pajak Hotel	equal variances assumed	0.095	.759	-2.633	0.013
	equal variances not assumed			-2.653	0.014
Pajak Restoran	equal variances assumed	0.052	.821	-7.613	0.000
	equal variances not assumed			-8.005	0.000
Pajak Parkir	equal variances assumed	0.608	.441	-4.913	0.000
	equal variances not assumed			-6.030	0.000

Berdasarkan informasi Tabel diatas dapat di ambil kesimpulan pertama, pada pajak hotel diperoleh Fhitung sebesar 0,095 dengan nilai signifikan 0,759 > 0,05 maka varians sama sehingga pengujian analisis beda *t independent* menggunakan equal variances assumed menghasilkan thitung -2,633 dengan nilai signifikan 0,013. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka 0,013 < 0,05 sehingga H0 di tolak dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak hotel. Kedua pada pajak restoran di peroleh Fhitung 0,052 dengan nilai signifikan 0,821 > 0,05 berarti varians sama sehingga pengujian analisis beda *t independent* menggunakan equal variances assumed yang menghasilkan t-hitung -7,613 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak restoran. Ketiga pada pajak parkir di peroleh nilai Fhitung sebesar 0,608 dengan nilai signifikan 0,441 > 0,05 berarti varians sama sehingga pengujian analisis beda *t independent* menggunakan equal variances assumed yang menghasilkan t-hitung -4,913 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti terdapat pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak parkir. Sehingga terjadi perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah diterapkannya sistem pajak *online*.

Efektivitas Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Sistem Online. Berdasarkan uji beda yang telah di jelaskan sebelumnya pajak daerah Kota Surabaya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah sistem *online*. Sehingga dalam perbedaan pendapatan asli daerah Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* dapat di maknai dengan efektivitas sebelum dan sesudah penerapan sistem *online*. Berikut disajikan tabel efektivitas sebelum dan sesudah sistem *online*.

Tabel 5. Efektivitas Sebelum dan Sesudah Sistem Online

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
Pajak Hotel Sebelum	2015	200.000.000.000,00	187.821.983.629,85	94%	Efektif
	2016	212.771.000.000,00	216.178.680.532,00	102%	Sangat Efektif
Pajak Hotel Sesudah	2017	222,421,087,816.00	233,793,472,823.00	105%	Sangat Efektif
Pajak Restoran Sebelum	2015	260.000.000.000,00	289.180.317.131,54	111%	Sangat Efektif
	2016	310.769.000.000,00	330.838.390.097,00	107%	Sangat Efektif
Pajak Restoran Sesudah	2017	366.162.881.267,00	386.793.643.531,31	106%	Sangat Efektif
Pajak Parkir Sebelum	2015	80.000.000.000,00	56.491.583.995,00	71%	Kurang Efektif
	2016	60.000.000.000,00	65.807.572.959,00	110%	Sangat Efektif
Pajak Parkir Sesudah	2017	66.400.000.000,00	75.002.121.630,00	113%	Sangat Efektif

Tabel di atas dapat di jelaskan sebagai berikut, *pertama* bahwa pajak hotel sebelum di berlakukannya sistem *online* yaitu pada tahun 2015 merupakan pencapaian efektivitas belum sangat efektif yaitu sebesar 94% dengan target Rp200.000.000.000 dan realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp187.821.983.629,85 dan pada tahun 2016 sebesar 102% yang telah mencapai efektivitas sangat efektif dengan target Rp212.771.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp216.178.680.332 pada tahun 2017 setelah dilakukannya sistem *online* pajak hotel mencapai efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 105% dengan target Rp222.421.087.816 dan realisasi pendapatan sebesar Rp233.793.472.823 sehingga mengalami peningkatan efektivitas sebesar 3% dari tahun sebelumnya. *Kedua*, pajak restoran sebelum di berlakukannya sistem *online* pada tahun 2015 mencapai efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 111% dengan target Rp260.000.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp289.180.317.131,54 akan tetapi dari tahun 2016 pencapain efektivitas menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 107% dengan target Rp310.769.000.000 dan realiasasi pendapatan sebesar Rp330.838.390.097 pada tahun 2017 setelah di terapkannya sistem *online* pajak restoran mencapai efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 106% dengan target Rp366.162.881.267 dan realisasi pendapatan sebesar Rp386.793.643.531,31 akan tetapi pencapaian efektivitas dari tahun sebelumnya menurun sebesar 1% sehingga pencapaian efektivitas dari 2015-2017 dapat dikatakan stabil. *Ketiga*, pajak parkir sebelum di berlakukannya sistem *online* pada tahun 2015 mencapai efektivitas kurang efektif yaitu sebesar 71% dengan target Rp80.000.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp56.491.583.995 dan pada tahun 2016 mencapai efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 110% dengan target

Rp60.000.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp65.807.572.959 pada tahun 2017 setelah di berlakukannya sistem *online* pajak parkir mencapai efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 113% dengan target Rp66.400.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp75.002.121.630 sehingga tingkat efektivitas pajak parkir mengalami peningkatan efektivitas dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3%

Sehingga setelah diberlakukannya sistem *online* dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir tingkat efektivitas masing-masing pajak terus meningkat akan tetapi hal ini tidak berlaku di pajak restoran yang tingkat efektivitasnya dari tahun 2015-2017 masih stabil. Dari manfaat yang bisa di ambil dari penerapan pajak sistem *online* memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan memberikan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaporkan besaran pajaknya, sehingga potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir yang otomatis akan memberi dampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian bahwa pajak daerah Kota Surabaya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah sistem *online* pajak hotel dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ dan menghasilkan t-hitung -2,633. Hasil tersebut di ikuti dengan pencapaian efektivitas dari tahun 2015–2017 terus meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Candrasari (2016) yang mengemukakan hasil penelitian tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2010 dan 2011 belum mencapai targetnya dimana prosentase menunjukkan di bawah 100%. Namun pada tahun 2012-2014 pencapai efektivitas kembali normal dengan sangat efektif. Hal ini di sebabkan karena jumlah hotel di Kota Surabaya semakin meningkat setiap tahunnya dan ditambah dengan mekanisme pelaporan dan pembayaran yang disediakan sistem *online* pajak hotel yang mempermudah wajib pajak dan dapat meminimalisir terjadinya kebocoran pajak sehingga pendapatan asli daerah Kota Surabaya meningkat dan mencapai target sepertidiharapkan.

Semakin tinggi pajak hotel juga akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya sehingga akan mencerminkan kinerja pemerintah Kota Surabaya dan akan memiliki nilai positif dari pemerintah pusat, karena pendapatan asli daerah yang besar merupakan cerminan kemandirian dari suatu daerah.

Pajak Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Online Pajak Restoran. Hasil uji sebelum dan sesudah sistem *online* pajak restoran dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan menghasilkan t-hitung -7,613. Hasil ini di ikuti penacapaian efektivitas dari tahun 2015-2017 yang stabil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Candrasari, 2016) yang mengemukakan efektivitas pajak restoran pada tahun 2013-2014. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dilihat prosentasenya mengalami penurunan terus-menerus dimana di tahun 2013 sebesar 105,57% sedangkan tahun 2014 sebesar 101,97%. Hal ini terjadi karena masih baru nya penerapan sistem *online* sehingga perlu adanya sosialisasi yang meluas terutama wajib pajak restoran yang baru seiring dengan semakin berkembangnya Kota Surabaya banyak para pemodal menanamkan modalnya seperti banyaknya bermunculan makanan cepat saji, rumah makan dan cafe yang tergolong dalam wajib pajak restoran, akan tetapi hasil ini tidak di imbangi dengan hasil prosentase yang terus menurun dari tahun 2015-2017 meski pencapai efektivitas mencapai sangat efektif. Dengan adanya sistem *online* pajak restoran yang gunanya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan dan pembayaran pajak dan untuk meminimalisir terjadinya potensi kehilangan pajak daerah karena pajak restoran merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar. Pajak restoran merupakan salah satu

komponen dari pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi sangat besar bagi pendapatan Kota Surabaya yang tercermin dalam realisasi pajak hotel dari tahun 2011-2016 mencapai target.

Pajak Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem *Online* Pajak Parkir.

Hasil uji sebelum dan sesudah sistem *online* pajak parkir dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan menghasilkan *t*-hitung -4,913 yang berarti terdapat perbedaan sebelum dan sesudah sistem *online* untuk pajak parkir. Hasil ini diikuti dengan pencapaian efektivitas dari tahun 2015-2017 terus meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil Damayanti (2017) yang menunjukkan efektivitas pajak parkir pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kendaraan Kota Surabaya ditambah dengan semakin banyaknya pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat parkir sehingga pendapatan pajak parkir meningkat, akan tetapi pada tahun 2015 pajak parkir tidak memenuhi target yang di harapkan karena di sebabkan target tahun 2015 terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada akhir 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya melakukan uji coba mengenai sistem *online* pajak parkir dan hasilnya pajak parkir pada 2016 targetnya terpenuhi sampai dengan tahun 2017 dan diikuti dengan peningkatan efektivitas dari tahun 2015-2017.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online*. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah adalah menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data yang di lakukan menggunakan dokumentasi. Berdasarkan hasil uji terkait pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak *online* dapat disimpulkan bahwa *pertama*, terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak hotel. *Kedua*, terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak restoran. *Ketiga*, terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem *online* pajak parkir. Pencapaian efektivitas sebelum dan sesudah sistem pajak *online* yang terus meningkat di sektor pajak hotel dan pajak parkir, akan tetapi di pajak restoran efektivitas masih sama antara sebelum dan sesudah sistem pajak *online*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bisnis restoran relatif fluktuatif, tetapi karena secara domisili bisnis ini terpetakan dengan baik sehingga perolehan pajak dari bisnis ini teridentifikasi dengan baik.

Hasil ini penelitian ini memberi rujukan bahwa dengan adanya sistem *online* mampu meningkatkan atau mempertahankan efektivitas pengumpulan pajak bagi pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari parkir, restoran, dan hotel. Sistem *online* masih perlu terus dikembangkan dan di *maintenance* sehingga dapat menjadi sistem yang andal. Seperti diketahui sistem ini kadang mengalami *error*. Jadi, tetap diperlukan pengawasan dan pemantauan untuk mengendalikan jumlah penerimaan yang diinginkan.

DAFTAR RUJUKAN

Candrasari, A. (2016). "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(2).

- Damayanti, D.N. (2017). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang.
- Ardhiansyah, D, S.M. Rahayu, A. Husaini. (2014). "Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadappendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 14 (1).
- Effendi, Z. (2017). Pakai Parkir Meter, Pendapatan Parkir Dishub Surabaya Naik 100%. <https://news.detik.com>. 05-11- 2017.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 PLS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi ke Kedelapan.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurel, C, Cifci,M. A., Dincer, M.I. and Fuchs, M. (2016). "Coping with reintermediation: The case of SMHEs". *Information Technology & Tourism*, 16: 375–92
- Ida, J. (2013). "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang". *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*, Semarang.
- Jannah, H.E.L.EN., Suyadi, I., dan Utami, H.N. (2016). "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1-8
- Lamia, A. (2015). "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Leliya, dan F. Afiah. (2017). "Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah *Online* Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa* 4(2).
- Mahangila, D and W Anderson. 2017. Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector in Zanzibar: Stakeholders' Perspectives". *Jurnal SAGE*, October-December 2017: 1–17.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah di Kota Surbaya. 15 Maret 2017. Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pajak Daerah. 27 April 2011. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4. Surabaya.
- Perdana, D. (2017). Masih Survei, Pemkot Uji Coba Sistem *Online* Pajak Daerah Pada Oktober. <http://Kelanakota.suarasurabaya.net>. 29-10-2017.
- Pertiwi, D. I., & Purwanti, E. Y. (2014). "Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang". *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 2-8
- Putri, B.A.W.P., S. Kumadji, dan A. Darono. (2014). "Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1-8.
- Rochmah. (2010). "Analisis Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Internet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) Terhadap Penerimaan Pajak". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Samudra, D. (2012). "Analisis Efektivitas Sistem *Online* Dalam Pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta". *Skripsi*. Universitas Indonesia. Depok.

- Siahaan, P.M. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Jakarta.
- Yuliandari, R, T. Chaidir, dan H. Mahmudi. (2017). "The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9 (2), ISSN 2086-1575 E-ISSN 2502-7115